

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada triwulan IV sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama triwulan IV. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kota Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inpektorat Daerah; dan
- h. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Target Perjanjian Kinerja :

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	3
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	3
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	78 %
		Opini BPK atas LKPD	WTP
5	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Inovasi	1

2. Target Anggaran pada Inspektorat :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.218.634.992
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.795.788.524
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.795.788.524
	2. Administrasi Kepegawaian Daerah	1.349.285.600
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;	1.147.727.000
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	201.558.600
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.877.101
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;	6.478.450
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	9.936.611
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.920.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	35.783.040
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	447.159.000
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.600.000
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.655.726
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	899.655.726

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
2	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	432.941.791 129.586.791 77.515.000 225.840.000
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.086.250 142.530.000 40.556.250
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.731.900.000
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; - Reviu Laporan Kinerja; - Reviu Laporan Keuangan. - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.217.500.000 409.180.000 302.950.000 41.660.000 72.956.000 390.754.000
3	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	514.400.000 21.940.000 492.460.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	708.746.664
3	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	54.194.000 25.086.000 29.108.000
	2. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	654.552.664 142.650.000 173.130.000 278.802.664 61.380.000
	Jumlah	12.659.281.656

B. PROGRES RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	25 %	50%	75%	100 % / 3
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	25 %	50%	75%	100 % / 3
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	25 %	50%	75%	100 % / 3
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	25 %	50%	75%	100% / 78 %
		Opini BPK atas LKPD	25 %	50%	75%	100% /

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
						WTP
5	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	25 %	50%	75%	100 % / B
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	25 %	50%	75%	100% / 80
		Inovasi	25 %	50%	75%	100% / 1 inovasi

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran Inspektorat untuk tahun anggaran 2024 triwulan IV sampai dengan laporan ini dibuat, dapat dilihat pada table berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3	3	100%
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	3	2	75%
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	3	2	75%
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	78 %	81,8	100%
		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83,15	100%
		Inovasi	1	1	100%

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Capaian/Realisasi Tahun s/d 2023
1.	Nilai AKIP SKPD	A	BB
2.	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3	3
3.	Level/Nilai Maturitas SPIP	4	2
4.	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	4	2
5.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	95%	81,87%

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Capaian/Realisasi Tahun s/d 2023
6.	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	83,15
8.	Inovasi	1	1

(sumber : Laporan Penilaian BPKP, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI Perwakilan SUMUT, LHP BPK atas LKPD Kota Pematangsiantar)

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standard Nasional :

Untuk kinerja Inspektorat tidak memiliki standard nasional karena masing-masing Inspektorat Daerah memiliki target kinerja yang tidak diintervensi oleh pihak yang ada ditingkat nasional. Target dan realisasi kinerja didasarkan pada kemampuan kinerja masing-masing Inspektorat.

Realisasi Program per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.218.634.992	9.855.523.519	96,45
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				
		Inovasi				
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.731.900.000	1.631.756.085	94,22
4	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP				
5	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan				
		Opini BPK atas LKPD				
6	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	708.746.664	605.403.320	85,42

(sumber : Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024)

Capaian Kinerja Keuangan Program Inspektorat triwulan IV Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

N0	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (RP)	Target Out Put	Satuan	Realisasi (Rp)	Realisasi Out Put	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.731.900.000	100	%	1.631.756.085,00	100	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.217.500.000	100	%	1.144.138.056,00	100	100
	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	409.180.000	4	Laporan	390.709.750,00	4	100
	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	302.950.000	15	Laporan	283.460.400,00	15	100
	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	41.660.000	12	Laporan	33.428.000,00	12	100
	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	72.956.000	12	Laporan	66.786.000,00	12	100
	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	390.754.000	20	Dokumen	369.753.906,00	20	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	514.400.000	100	%	487.618.029,00	100	100
	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	21.940.000	5	Laporan	19.535.000,00	5	100
	<i>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	492.460.000	15	Laporan	468.083.029,00	15	100
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	708.746.664	100	%	605.403.320,00	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	54.194.000	100%	%	34.368.000,00	100%	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	25.086.000	4	Rekomendasi	13.945.000,00	4	100
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	29.108.000,00	4	Rekomendasi	20.423.000,00	4	100
	Pendampingan dan Asistensi	654.552.664	100	%	571.035.320,00	100	100
	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	142.650.000	16	OPD	129.994.518,00	16	100
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	173.130.000	8	OPD	161.779.015,00	8	100

N0	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Target Out Put	Satuan	Realisasi (Rp)	Realisasi Out Put	Capaian (%)
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	278.802.664	10	Kegiatan	241.772.787,00	10	100
	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	59.970.000	1	OPD	37.489.000,00	1	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	10.218.634.992	100	%	9.855.523.519,00	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.795.788.524	100	%	6.738.694.298,00	90,91%	90,91
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.795.788.524	55	Orang/ bulan	6.738.694.298,00	50	90,91
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.349.285.600	100	%	1.181.395.430,00	100	100
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	1.147.727.000	55	Orang	1.064.441.780,00	55	100
	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	201.558.600	1	Orang	116.953.650,00	1	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.877.101	100	%	515.937.762,00	100	100
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.478.450	12	Paket	5.742.000,00	12	100
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	9.936.611	12	Paket	9.860.148,00	12	100
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	45.920.000	12	Paket	7.902.000,00	12	100
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	35.783.040	12	Paket	23.584.895,00	12	100
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	447.159.000	12	Laporan	436.248.719,00	12	100
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12.600.000	12	Dokumen	12.600.000,00	12	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.655.726	100	%	59.790.000,00	100	100
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	899.655.726	100	Unit	859.790.000,00	81	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432.941.791	100	%	401.642.619,00	100	100
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	129.586.791	12	Laporan	125.975.269,00	12	100

N0	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Target Out Put	Satuan	Realisasi (Rp)	Realisasi Out Put	Capaian (%)
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	77.515.000	12	Laporan	53.247.350,00	12	100
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	225.840.000	12	Laporan	222.420.000,00	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.086.250	100	%	158.063.410,00	100	100
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	142.530.000	60	Unit	119.438.410,00	60	100
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	40.556.250	5	Unit	38.625.000,00	5	100

(sumber: Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023)

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Mengacu kepada capaian Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, Inspektorat mampu berhasil mencapai sebagian dari target kinerja yang telah ditetapkan, ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tersedianya anggaran yang memadai

Pada awal Tahun 2024 Inspektorat Daerah Pematangsiantar diberikan anggaran sebesar Rp12.659.281.656,00 dan untuk Tahun 2024 tidak dilaksanakan perubahan APBD pada Pemerintah Kota Pematangsiantar sehingga anggaran Inspektorat juga tidak mengalami perubahan selama Tahun 2024.

2. Sumber Daya Manusia yang Mumpuni

Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar telah diuraikan pada bab sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah objek yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat sesungguhnya jumlah dari SDM tersebut masih dirasakan kurang. Akan tetapi kekurangan ini tidak menghalangi Inspektorat dalam pencapaian target kinerjanya. Peningkatan kemampuan SDM terus dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh inspektorat sendiri melalui Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS) maupun pendidikan dan pelatihan yang melibatkan pihak luar sebagai penyelenggaranya. Pengembangan dan peningkatan kapabilitas SDM ini tentunya sangat membantu dalam menciptakan SDM yang mumpuni dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja APIP/Inspektorat Kota Pematangsiantar, fasilitas merupakan instrumen penting yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Fasilitas sebagaimana dimaksud terdiri dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Pematangsiantar yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar. Beragam jenis fasilitas dimaksud merupakan inventaris Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar yang digunakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sepanjang Tahun 2024 untuk pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

4. Adanya koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektorat didukung adanya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Perjanjian kerjasama antara Inspektorat dengan APH mendorong peningkatan kinerja Inspektorat melalui kegiatan penanganan penyelesaian kerugian daerah dan saber pungli.

5. Adanya komitmen Kepala Daerah yang tinggi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Visi Wali Kota Pematangsiantar yakni Mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas. Visi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang berkualitas merupakan visi yang berhubungan dengan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Adanya visi tersebut secara langsung mendukung kinerja Inspektorat karena Wali Kota menaruh perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2024, ada 2 (dua) target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang belum dapat dicapai oleh Inspektorat yaitu level maturitas SPIP dan maturitas Manajemen Risiko. Kegagalan ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat permasalahan berupa:

- a. Sasaran program, kegiatan, sub kegiatan tidak berorientasi hasil dan tidak terkait dengan sasaran di atasnya;
- b. Indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak berorientasi hasil, tidak spesifik dan relevan, dan tidak cukup menggambarkan sasaran;
- c. Target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan tidak proyektif.

2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pemerintah Kota Pematangsiantar telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko kemitraan dan risiko fraud). Pemerintah Kota Pematangsiantar telah memperoleh aplikasi Risk Management Information System pada Bulan November tahun 2024 dari BPKP yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam manajemen risiko sejak tahun 2025. Namun demikian, proses manajemen risiko pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Pematangsiantar maupun Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar belum mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko pada OPD. Hal ini terkonfirmasi melalui:

- a. Unit kepatuhan belum melakukan pemantauan terhadap efektifitas implementasi manajemen risiko;
- b. Belum dimanfaatkannya informasi terkait risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. Belum ada laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko (UPR).
- d. Belum ada laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Hasil penilaian menunjukkan bahwa masih terdapat capaian kinerja yang kurang dapat diyakini daya ungkitnya terhadap pencapaian ultimate outcome, dikarenakan penetapan indikator, sasaran dan target yang kurang

tepat. Kemudian, masih terdapat temuan berulang pada LHP BPK atas LKPD Kota Pematangsiantar, seperti temuan kekurangan volume pekerjaan, namun dengan jumlah temuan yang cenderung sudah mengalami penurunan.

4. Hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP fokus penilaian pada Penurunan Prevalensi Stunting dan Sektor UMKM dan Pariwisata

a. Proses Perencanaan Pada proses perencanaan masih terdapat kelemahan baik pada saat penetapan Sasaran Strategis Pemda, Sasaran Strategis OPD, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yaitu masih terdapat sasaran yang belum tepat serta indikator dan target belum SMART.

b. Proses Pengendalian atas Proses Bisnis Berdasarkan hasil pengujian kepada beberapa OPD yang terlibat pada intervensi pengentasan sektor Penurunan Prevalensi Stunting dan UMKM, secara umum telah melakukan pengelolaan risiko yang memadai namun masih perlu perbaikan, diantaranya:

1) Belum seluruhnya pegawai memahami konteks risiko, penyebab risiko dan dampak risiko.

2) Implementasi manajemen risiko belum diintegrasikan dengan proses bisnis pemerintah daerah secara menyeluruh.

Hal tersebut disebabkan pimpinan instansi pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum secara optimal menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan dan belum secara maksimal mendorong penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja perangkat daerah.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dokumen laporan kinerja triwulan IV merupakan hasil evaluasi kinerja selama 3 bulan yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Sesuai hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Pematangsiantar, Januari 2025
INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, S.H, M.H, CGCAE
PEMBINA Tk. I
NIP.19810927 200502 1 001